

BAB IV
ANALISIS PENGELOLAAN KOMITE SEKOLAH DALAM
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SD ISLAM AL AZHAR 29
SEMARANG

A. Analisis Pengelolaan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Islam Al Azhar 29 Semarang

Komite Sekolah SD Islam Al Azhar 29 Semarang atau yang juga disebut Jam'iyah SDIA 29, telah melakukan sebuah proses pengelolaan dalam menjalankan roda organisasinya. Pengelolaan dilakukan untuk mengatur sumber daya manusia, maupun sumber daya dana yang ada, dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan yakni meningkatkan mutu pendidikan di SD Islam Al Azhar 29 Semarang.

Pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, dilaksanakan dengan mengoptimalkan empat peran komite sekolah, yakni:

1. Komite Sekolah bertindak sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
2. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan
4. Mediator (*mediator agency*) antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan atau mediator antara masyarakat dengan satuan pendidikan.

Pengelolaan Komite Sekolah merupakan suatu cara untuk mengatur sebuah organisasi, mulai dari perencanaan program kerja, pengorganisasian, pelaksanaan program kerja, dan evaluasi program kerja,

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi Komite Sekolah agar tujuan dibentuknya Komite Sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien

1. Perencanaan

Perencanaan program kerja Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan harus berkiblat pada keempat perannya. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, seefektif dan seefisien mungkin. Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, minimal memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. Supaya masukan tersebut sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, diperlukan informasi-informasi yang didasarkan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sumberdaya pendidikan di masyarakat sekitar sekolah.
- b. Menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah.
- c. Menyampaikan masukan, pertimbangan atau rekomendasi secara tertulis kepada sekolah.
- d. Memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
- e. Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
- f. Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan (PAKEM).
- g. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pendidikan di sekolah.

- h. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan RAPBS.

Perencanaan dalam hal sebagai pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, minimal dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengadakan pertemuan secara berkala dengan *stakeholders* di lingkungan sekolah.
- b. Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/industri untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu.
- c. Memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.
- d. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, seperti; mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/industri dalam penyediaan sarana/prasarana serta biaya pendidikan untuk masyarakat tidak mampu, dan ikut memotivasi masyarakat untuk melaksanakan kebijakan pendidikan sekolah.

Perencanaan Komite Sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Minimal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan dari satuan pendidikan. Dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Meminta penjelasan sekolah tentang hasil belajar siswa di sekolahnya.
- b. Mencari penyebab ketidakberhasilan belajar siswa, dan memperkuat berbagai hal yang menjadi keberhasilan belajar siswa.

Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada *stakeholder* secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi, maupun non materi kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Perencanaan program kerja komite sekolah sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan, dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti :

- a. Melakukan kerjasama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi pemerintah dan kemasyarakatan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu.
- b. Membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh *stakeholders* pendidikan di sekitar sekolah.
- c. Mengadakan penjajagan tentang kemungkinan untuk dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga lain di luar sekolah untuk memajukan mutu pembelajaran di sekolah.
- d. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, dalam bentuk: menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran dan ide kreatif dari *stakeholder* pendidikan di sekitar sekolah; menyampaikan laporan kepada masyarakat secara tertulis tentang hasil pengamatannya terhadap perkembangan pendidikan di daerah sekitar sekolahnya.

Perencanaan sangat penting dilakukan, karena tanpa adanya rencana berarti tidak ada tujuan yang dicapai, adanya rencana tidak ada pedoman pelaksanaan, sehingga banyak pemborosan, dan rencana merupakan dasar pengendalian, kerana tanpa adanya rencana pengendalian tidak dapat dilakukan.

Jika rencana program kerja Komite Sekolah sudah mencakup keempat peran tersebut di atas, maka dapat dikatakan perencanaan

Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Satuan Pendidikan sudah baik, tinggal bagaimana pelaksanaannya nanti, apakah dapat dilaksanakan sesuai rencana atau justru sebaliknya. Karena semua itu tergantung bagaimana Komite Sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, maupun sumber daya keuangan, dan lingkungan sosial ekonomi yang mendukungnya.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan tindakan penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, penugasan tanggung jawab tertentu, dan pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Pengorganisasian juga merupakan pengaturan kerja sama sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi.

Dalam melaksanakan pengorganisasian, Komite Sekolah SD Islam Al Azhar 29 Semarang mengatur sumber daya manusia dan sumber daya finansial ke dalam pembagian kerja. Hal ini berarti proses pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah dilakukan Komite Sekolah. Dalam proses pengorganisasian ada tiga langkah yang perlu dilakukan dalam proses pengorganisasian, yaitu :

- a. pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi
- b. pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang logik dapat dilaksanakan oleh satu orang; dan
- c. pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan realisasi rencana program kerja dalam bentuk kegiatan yang nyata. Dalam melaksanakan perannya sebagai *advisory agency*, *supporting agency*, *controlling agency* dan *mediator*

agency, komite sekolah dapat melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam tujuh fungsi komite sekolah yang dapat membantu peningkatan mutu di satuan pendidikan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
- b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - 1) kebijakan dan program pendidikan
 - 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
 - 3) kriteria kinerja satuan pendidikan
 - 4) kriteria tenaga kependidikan
 - 5) kriteria fasilitas pendidikan
 - 6) dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
- e. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Dalam proses pelaksanaan program kerja, ketua Komite Sekolah SDIA 29 bertindak sebagai pengarah dan pemberi motivasi agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan dengan lancar. Pengarahan dalam proses pelaksanaan sangat penting, karena pengarahan yang dilakukan sebelum memulai bekerja, berguna untuk menekankan hal-hal yang perlu ditangani, urutan prioritas, prosedur

kerja dan lain-lainnya agar pelaksanaan pekerjaan dapat efektif dan efisien. Pengarahan yang dilakukan selama melaksanakan tugas bagi orang-orang yang terlibat dimaksudkan untuk mengingatkan ataupun meluruskan apabila terjadi penyelewengan atau penyimpangan.

4. Evaluasi

Evaluasi program kerja Komite Sekolah SDIA 29, dilakukan untuk menilai semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu evaluasi juga dilakukan untuk menemukan indikator yang menyebabkan sukses atau gagalnya suatu kegiatan Komite Sekolah dalam pencapaian tujuan, sehingga dapat dijadikan bahan kajian dalam kegiatan Komite Sekolah berikutnya. Evaluasi yang harus dilakukan adalah evaluasi tentang seberapa jauh Komite Sekolah telah melaksanakan keempat perannya tersebut. Kemudian hasil dari evaluasi tersebut dapat dijadikan umpan balik dalam merencanakan kegiatan yang akan datang.

Dalam melaksanakan evaluasi program kerja Komite Sekolah harus dilakukan oleh seluruh pengurus Komite Sekolah, agar permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program kerja dapat diketahui. Dengan mengetahui kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan, perbaikan dan pencarian solusi yang tepat dapat ditemukan dengan mudah. Pencarian solusi akan lebih mudah jika dilakukan bersama-sama.

B. Analisis Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Islam Al Azhar 29 Semarang.

Setiap proses kerja akan berhasil jika dipengaruhi faktor-faktor pendukung. Tetapi proses kerja tersebut bisa juga kurang berhasil secara efektif dan efisien, atau bahkan tidak berhasil sama sekali jika faktor penghambat lebih besar daripada faktor pendukung. Demikian halnya

Komite Sekolah SDIA 29 Semarang dalam menjalankan program kerjanya tentu tidak luput dari faktor pendukung dan faktor penghambat.

1. Faktor pendukung

- a. Besarnya dukungan dari wali murid, dewan guru dan kepala sekolah SD Islam Al Azhar 29 Semarang terhadap keberadaan Jam'iyah di SD Islam Al Azhar 29 Semarang. Besarnya dukungan ini akan memperlancar setiap kegiatan-kegiatan Jam'iyah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Islam Al Azhar 29 Semarang. Karena tanpa dukungan baik berupa pemikiran, tenaga maupun dana dari berbagai pihak, mustahil kegiatan-kegiatan Komite Sekolah dapat berjalan sesuai rencana.
- b. Pengurus Jam'iyah di SD Islam Al Azhar 29 Semarang didominasi oleh kaum ibu-ibu. Kaum Ibu biasanya sangat paham dengan keperluan anak-anaknya, menerima laporan langsung dari anak-anaknya tentang peristiwa di sekolah setiap hari, dan mereka mempunyai jaringan yang kuat. Ibu-ibu dengan mudah bersosialisasi dan membentuk network semacam kelompok pengajian atau arisan. Ini yang menjadikan motivasi dan intensitas pertemuan mereka tinggi, sehingga menghasilkan ide-ide segar untuk kemajuan mutu di SD Islam Al Azhar 29 Semarang.
- c. Pengurus Jam'iyah adalah orang-orang yang berpendidikan, meskipun tidak semuanya dari kalangan pendidikan. Orang yang mempunyai pendidikan tinggi, lebih mudah untuk diajak berfikir, atau memecahkan suatu permasalahan. Tentu saja latar belakang ini mempengaruhi kinerja Komite Sekolah.
- d. Pengurus Jam'iyah mempunyai *network* diperusahaan-perusahaan ternama, sehingga mudah mencari sponsorship untuk pendanaan program kegiatan Jam'iyah maupun program kegiatan sekolah. Murid-murid Al azhar 29 adalah berasal dari keluarga menengah ke atas. Mata pencaharian orang tuanya sebagian adalah pengusaha, atau karyawan yang mempunyai jabatan tinggi di

sebuah perusahaan. Sehingga dalam setiap penggalan dana, Pengurus Jam'iyah mendapat bantuan dari wali murid yang berpotensi ini. Inilah fungsi dari membina hubungan baik dengan semua stakeholder pendidikan di SDIA 29 Semarang.

2. Faktor penghambat

- a. Kesibukan pribadi dari masing-masing pengurus Jam'iyah cukup menghambat proses kerja Jam'iyah. Kesibukan ini berimbas kepada pertemuan rutin atau dalam mensosialisasikan program kerja selanjutnya. Karena kehadiran pengurus Jam'iyah dalam rapat-rapat sangat penting, karena rapat-rapat tersebut membahas tentang program kerja yang akan dilaksanakan maupun yang telah terlaksana. Jika yang bersangkutan tidak hadir, maka akan menghambat jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan.
- b. Masih adanya pengurus Jam'iyah yang tidak melaksanakan tugasnya. Hal ini jelas menghambat organisasi dalam melaksanakan program kerjanya. Akibatnya tanggung jawab yang seharusnya dipikul, akan membebani pengurus yang lain, yang seharusnya tidak memikul tanggung jawab tersebut. Padahal tiap-tiap pengurus Jam'iyah sudah mempunyai tanggung jawab masing-masing. Jika sudah demikian, maka program kerja bisa saja tidak berjalan.
- c. Kurangnya wawasan tentang organisasi Komite Sekolah, dan wawasan tentang kependidikan. Hal ini mempengaruhi cara pandang dan cara berfikir pengurus Jam'iyah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Seperti dalam program kerja Jam'iyah di atas, ada banyak kegiatan yang kurang menyentuh proses pembelajaran. Padahal proses pembelajaran merupakan kunci dihasilkannya *output* yang berkualitas. Hal ini lebih dikarenakan karena kurangnya pengetahuan dalam bidang pendidikan. Adanya Pengurus yang tidak melaksanakan tugasnya

juga dipengaruhi kurangnya wawasan dalam bidang keorganisasian, khususnya organisasi Komite Sekolah.

Faktor pendukung pengelolaan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDI Al Azhar 29 harus terus diberdayakan, melalui selalu menjalin hubungan yang harmonis terhadap *stakeholder* pendidikan khususnya wali murid. Kemudian faktor penghambat yang ada dapat diminimalisir, dengan melakukan pembinaan-pembinaan terhadap Komite Sekolah dalam hal wawasan keorganisasian Komite Sekolah dan wawasan dalam bidang pendidikan. Baik mengikuti seminar-seminar pendidikan ataupun mengadakan pelatihan-pelatihan keorganisasian.